BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Walhi
Edisi : 16 APRIL 2008
Hari : Rabu
Hal. : 14

PNLH X Walhi

Dibutuhkan "Roadmap" untuk Keadilan Ekologis

YOGYAKARTA, KOMPAS - Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup atau PNLH X yang digelar di Yogyakarta, 16-23 April 2008, bertekad merumuskan peta jalan (road map) baru untuk mencapai keadilan ekologis di Indonesia. Hajatan tiga tahunan ini mencoba memastikan gerakan lingkungan hidup menjadi gerakan sosial-politik rakyat.

Ajang pertemuan ini merupakan pertemuan anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) se-Indonesia yang menjadi forum tertinggi organisasi untuk menentukan arah strategi program Walhi. PNLH kali ini akan digelar di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul, dan berpusat di Pasar Seni Gabusan. Sekitar seribu peserta dari organisasi rakyat dan kaum enviromentalis di 25 provinsi akan berpartisipasi aktif dan tinggal bersama penduduk di Dusun Tembi, Gabusan, Gatak, Balong, dan Dagan.

”Selama 28 tahun berhadapan dengan isu lingkungan, kami belum mampu sepenuhnya menghadapi krisis lingkungan di Indonesia. Karena itu perlu peta jalan baru,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad pada konferensi pers, Selasa (15/4).Kondisi kritis di Indonesia, kata Chalid, terkait tiga hal, yakni rendahnya kualitas kebijakan tentang lingkungan, pemanasan global, dan krisis pangan global. Salah satu kebijakan yang dianggap memiskinkan lingkungan adalah PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.

Melibatkan masyarakat

Lewat PNLH X, Chalid berharap gerakan lingkungan jadi kekuatan politik alternatif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. ”Kami ingin membangkitkan massa yang kritis (critical mass). Rakyat harus tahu krisis yang mereka hadapi sehingga bisa membuat keputusan politisnya sendiri,” ujarnya.Bergesernya isu lingkungan menjadi isu politis, menurut Chalid, akan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang prolingkungan. Untuk itu perlu kesadaran kolektif bersama tentang musuh yang dihadapi bersama.

Yogyakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan karena, ”Kebudayaan dan kearifan lokal masih dijunjung di Yogya. Dengan nilai-nilai itu penghormatan terhadap lingkungan tetap tumbuh,” ujar Direktur Walhi DIY Suparlan. Acara yang dimulai hari Rabu ini akan diisi berbagai lomba kreativitas dan lain-lain. Selama kegiatan, panitia akan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di areal acara. (A11)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup